

KLASIFIKASI WILAYAH PROVINSI DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN TIPOLOGI KLASSEN

Henry Sarnowo
Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta
hensnine@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the classification of the provinces in Indonesia using the approach of Klassen Typology 2011-2013. Klassen Typology is a tool used to determine an overview of the economic growth pattern and structure of each region. Through this analysis tool was obtained 4 (four) characteristic pattern and structure of economic growth are different, the area of fast forward and fast growth (high growth and high income), developed regions but depressed (high income but low growth), the area is growing fast (high but income growth), and the area is relatively underdeveloped (low growth and low income).

Based on the results of research using Klassen Typology analysis can be summarized as follows. First, most of the provinces in Indonesia in the period 2011-2013 was included in the classification of the fast growing areas, as many as 18 provinces scattered in Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku. Second, the classification next area is relatively underdeveloped areas, as many as 10 provinces scattered in Sumatra, Java, Nusa Tenggara, Kalimantan, and Papua. Third, the classification of the area fast forward and fast-growing as much as three provinces, namely Riau Islands, Jakarta, and West Papua. Fourth, the classification developed regions but suppressed as much as two provinces, Riau and East Kalimantan.

Keywords: *KlassenTypology, structure and pattern of economic growth, the classification of the area.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah adalah menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal nasional, dan agama, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah yang dimaksud adalah pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai sumber-sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan hampir seluruh fungsi pemerintahan menyebabkan kebutuhan dana yang cukup besar untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Jumlah provinsi di Indonesia cukup banyak, yaitu sebanyak 33 provinsi yang tersebar di berbagai pulau. Pulau Sumatera terdiri atas 10 provinsi, pulau Jawa terdiri atas 6 provinsi, pulau Bali terdiri atas 1 provinsi, pulau Kalimantan terdiri atas 4 provinsi, pulau Sulawesi terdiri atas 6 provinsi, 2 provinsi berada di Nusa Tenggara, 2 provinsi berada di Maluku, dan 2 provinsi berada di Papua. Adapun kondisi perekonomian daerah Provinsi di Indonesia ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga

No.	Provinsi	PDRB (miliar Rupiah)	PDRB per Kapita (ribu Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB(%)
1.	Aceh	38.012,97	7.901.042,58	4,18
2.	Sumatera Utara	142.537,12	10.488.189,81	6,01
3.	Sumatera Barat	46.640,24	9.205.656,07	6,18
4.	Riau	109.073,14	18.078.616,28	2,61
5.	Jambi	21.979,28	6.688.621,05	7,88
6.	Sumatera Selatan	76.409,76	9.760.161,12	5,98
7.	Bengkulu	10.052,31	5.540.424,77	6,21
8.	Lampung	46.123,35	5.814.747,63	5,97
9.	Bangka Belitung	12.905,01	9.812.780,22	5,29
10.	Kepulauan Riau	49.667,22	26.683.112,21	6,13
11.	DKI Jakarta	477.285,25	47.872.390,65	6,11
12.	Jawa Barat	386.838,84	8.531.804,65	6,06
13.	Jawa Tengah	223.099,74	6.706.874,30	5,81
14.	DI Yogyakarta	24.567,48	6.834.067,84	5,40
15.	Jawa Timur	419.428,45	10.933.094,75	6,55
16.	Banten	105.856,07	9.243.060,59	5,86
17.	Bali	34.787,96	8.576.188,65	6,05
18.	NTB	20.417,22	4.334.098,16	5,69
19.	NTT	14.746,06	2.976.615,86	5,56
20.	Kalimantan Barat	36.075,10	7.772.473,36	6,08
21.	Kalimantan Tengah	22.999,68	9.644.549,94	7,37
22.	Kalimantan Selatan	36.196,22	9.390.675,60	5,18
23.	Kalimantan Timur	121.990,49	31.515.427,92	1,59
24.	Sulawesi Utara	22.872,16	9.690.001,27	7,45
25.	Sulawesi Tengah	22.979,40	8.249.685,89	9,38
26.	Sulawesi Selatan	64.284,43	7.706.073,88	7,65
27.	Sulawesi Tenggara	15.040,86	6.275.618,25	7,28
28.	Gorontalo	3.646,55	3.321.114,59	7,76
29.	Sulawesi Barat	6.112,65	4.952.514,03	7,16
30.	Maluku	5.111,31	3.138.828,66	5,14
31.	Maluku Utara	3.656,30	3.279.499,47	6,12
32.	Papua Barat	15.061,52	18.183.805,39	9,30
33.	Papua	24.616,65	8.117.641,17	14,84
Indonesia		2.769.053,0	11.134.017,58	5,73

Konstan 2000, Tahun 2013

Sumber: www.bps.go.id

Tabel 1. menunjukkan bahwa PDRB terendah pada 2013 adalah PDRB

Provinsi Gorontalo, yaitu sebesar Rp3.646,55 miliar, sedangkan PDRB tertinggi adalah PDRB DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp477.285,25 miliar. PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan PDRB per kapita terendah pada 2013, yaitu sebesar Rp2.976.615,86 miliar, sedangkan PDRB per kapita DKI Jakarta merupakan PDRB per kapita tertinggi, yaitu sebesar Rp47.872.390,65 miliar. Laju Pertumbuhan PDRB terendah pada 2013 terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 1,59%, sedangkan Laju Pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi di Provinsi Papua, yaitu sebesar 14,84%.

Setelah memperhatikan latar belakang tersebut di muka, maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana klasifikasi wilayah (Provinsi) di Indonesia periode 2011-2013 menurut Tipologi Klassen?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Jika dibuat suatu fungsi, pembangunan daerah merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, *entrepreneurship*, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan (L. Arsyad, 1999).

2. *Klassen Typology* (Tipologi Klassen)

Klassen Typology (Tipologi Klassen) adalah alat yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen padadasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Klasifikasi daerah kabupaten/kota menurut Tipologi Klassen adalah sebagai berikut (H. Aswandi dan M. Kuncoro, 2002: 30):

- a. daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) adalah daerah kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah provinsi;
- b. daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi,

tetapi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah provinsi;

- c. daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah provinsi;
- d. daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah provinsi.

Dikatakan “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan dengan indikator di provinsi, dan dikatakan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan dengan indikator di provinsi.

Klasifikasi sektor ekonomi juga dapat dilakukan seperti pada pendekatan Tipologi Klassen, yaitu (Wardana, 2007):

- a. sektor cepat maju dan cepat tumbuh adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata seluruh sektor;
- b. sektor maju tapi tertekan adalah sektor yang memiliki kontribusi lebih tinggi, tetapi memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh sektor;
- c. sektor berkembang cepat adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi memiliki kontribusi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh sektor;
- d. sektor relatif tertinggal adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang lebih rendah

dibandingkan dengan rata-rata seluruh sektor.

Dikatakan “tinggi” apabila indikator suatu sektor lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata seluruh sektor, dan dikatakan “rendah” apabila indikator suatu sektor lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh sektor.

3. Hasil Penelitian Sebelumnya

a. Hairul Aswandi dan Mudrajat Kuncoro (2002)

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, 10 (sepuluh) kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. *Pertama*, Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh terdiri atas Kabupaten Kotabaru. *Kedua*, Daerah Maju tetapi Tertekan terdiri atas Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banto Kuala. *Ketiga*, Daerah Berkembang Cepat terdiri atas Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai

Utara, dan Tapin. *Keempat*, Daerah Relatif Tertinggal terdiri atas Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.

b. Elia Radianto (2003)

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Maluku dapat diklasifikasikan sebagai berikut. *Pertama*, tidak ada kabupaten/kota yang termasuk dalam klasifikasi Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh. *Kedua*, Daerah Maju tetapi Tertekan terdiri atas Kota Ambon. *Ketiga*, Daerah Berkembang Cepat terdiri atas Kabupaten Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat, *Keempat*, Daerah Relatif Tertinggal terdiri atas Kabupaten Maluku Tengah, dan Pulau Buru.

c. I Made Wardana (2007)

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat diklasifikasikan sebagai

berikut. *Pertama*, Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh terdiri atas Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. *Kedua*, tidak ada kabupaten/kota yang termasuk dalam klasifikasi Daerah Maju tetapi Tertekan. *Ketiga*, Daerah Berkembang Cepat terdiri atas Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Buleleng. *Keempat*, Daerah Reratif Tertinggal terdiri atas Kabupaten Bangli, dan Karangasem.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, 9 (sembilan) sektor diProvinsi Bali dapat diklasifikasikan sebagai berikut. *Pertama*, Sektor Cepat Maju dan Cepat Tumbuh adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. *Kedua*, Sektor Maju tetapi Tertekan terdiri atas Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, serta Sektor Jasa-jasa. *Ketiga*, Sektor Berkembang Cepat terdiri atas Sektor

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta Sektor Bangunan. *Keempat*, Sektor Reratif Tertinggal terdiri atas Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, Sektor Industri Pengolahan, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian.

METODE PENELITIAN

1. Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 periode 2011-2013;
- b. Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 periode 2011-2013.;
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi periode 2011-2013;

d. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi periode 2011-2013.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2011-2013. Data ini merupakan data di tingkat nasional maupun data di tingkat Provinsi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Adapun data yang digunakan adalah sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Klassen Typology* (Tipologi Klassen). *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) adalah alat yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Klasifikasi berdasarkan wilayah

(daerah) dan sektor ekonomi ditunjukkan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Klasifikasi Daerah Menurut *Klassen Typology*

Laju pertumbuhan PDRB (g)	PDRB per kapita (y)	
	$y_i > y$	$y_i < y$
$g_i > g$	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh	Daerah Berkembang Cepat
$g_i < g$	Daerah Maju tapi Tertekan	Daerah Relatif Tertinggal

dimana :

g_i = Laju pertumbuhan PDRB provinsi i

y_i = PDRB perkapita provinsi i

g = Laju pertumbuhan PDB

y = PDB perkapita

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

1. PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi terlihat dalam tabel 4.1. Berdasarkan data Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita Provinsi tersebut dapat ditentukan peringkat “tinggi” atau “rendah” terhadap Provinsi tersebut seperti ditunjukkan dalam tabel 3. Dikatakan

peringkat “tinggi” apabila:

- a. Laju Pertumbuhan PDRB suatu Provinsi lebih tinggi dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan
- b. PDRB per kapita suatu provinsi lebih tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Dikatakan peringkat “rendah” apabila:

- a. Laju pertumbuhan PDRB suatu Provinsi lebih rendah dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan
- b. PDRB per kapita suatu provinsi lebih rendah dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB per Kapita Provinsi, Periode 2011-2013

No	Provinsi	Rerata Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Tinggi/Rendah	Rerata PDRB per Kapita (Rp)	Tinggi/Rendah
1.	Aceh	4,72	Rendah	7.717.661	Rendah
2.	Sumatera Utara	6,28	Tinggi	10.030.426	Rendah
3.	Sumatera Barat	6,27	Tinggi	8.787.049	Rendah
4.	Riau	3,73	Rendah	18.029.468	Tinggi
5.	Jambi	7,95	Tinggi	6.329.550	Rendah
6.	Sumatera Selatan	6,16	Tinggi	9.352.031	Rendah
7.	Bengkulu	6,42	Tinggi	5.303.900	Rendah
8.	Lampung	6,31	Tinggi	5.550.563	Rendah
9.	Bangka Belitung	5,84	Rendah	9.517.837	Rendah
10.	Kepulauan Riau	6,54	Tinggi	25.886.398	Tinggi
11.	DKI Jakarta	6,46	Tinggi	45.593.170	Tinggi
12.	Jawa Barat	6,28	Tinggi	8.170.948	Rendah
13.	Jawa Tengah	6,06	Rendah	6.385.026	Rendah
14.	DI Yogyakarta	5,30	Rendah	6.566.888	Rendah
15.	Jawa Timur	7,01	Tinggi	10.320.596	Rendah
16.	Banten	6,13	Rendah	8.926.511	Rendah
17.	Bali	6,40	Tinggi	8.178.124	Rendah
18.	NTB	0,63	Rendah	4.251.565	Rendah
19.	NTT	5,53	Rendah	2.870.631	Rendah
20.	Kalimantan Barat	5,95	Rendah	7.460.434	Rendah
21.	Kalimantan Tengah	6,94	Tinggi	9.221.271	Rendah
22.	Kalimantan Selatan	5,67	Rendah	9.082.259	Rendah
23.	Kalimantan Timur	3,22	Rendah	31.594.976	Tinggi
24.	Sulawesi Utara	7,57	Tinggi	9.123.615	Rendah
25.	Sulawesi Tengah	9,25	Tinggi	7.686.766	Rendah
26.	Sulawesi Selatan	7,88	Tinggi	7.233.184	Rendah
27.	Sulawesi Tenggara	8,88	Tinggi	5.929.226	Rendah
28.	Gorontalo	7,72	Tinggi	3.136.648	Rendah
29.	Sulawesi Barat	8,83	Tinggi	4.690.303	Rendah
30.	Maluku	6,34	Tinggi	3.016.331	Rendah
31.	Maluku Utara	6,40	Tinggi	3.154.673	Rendah
32.	Papua Barat	17,40	Tinggi	16.795.821	Tinggi
33.	Papua	3,53	Rendah	7.533.549	Rendah
Indonesia		6,16		10.663.197	

Sumber: www.bps.go.id, data diolah.

2. Klasifikasi Daerah Menurut Klassen

Typology (Tipologi Klassen)

Dari hasil peringkat dalam tabel 3, kabupaten/kota tersebut diklasifikasikan menurut Klassen *Typology* (Tipologi Klassen) seperti ditunjukkan dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Klasifikasi Wilayah Provinsi Menurut Klassen *Typology*

Laju pertumbuhan PDRB (g)	PDRB per kapita (y)	
	$y_i > y$	$y_i < y$
$g_i > g$	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh: Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papua Barat.	Daerah Berkembang Cepat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
$g_i < g$	Daerah Maju tapi Tertekan: Riau, Kalimantan Timur.	Daerah Relatif Tertinggal: Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Sumber: Data diolah.

Tabel 4. menunjukkan bahwa provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat berkembang adalah Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan Provinsi Papua Barat. Provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan adalah Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat adalah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal adalah Aceh, Provinsi Bangka Belitung,

Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis Tipologi Klassen pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, sebagian besar provinsi di Indonesia pada periode 2011-2013 termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, yaitu sebanyak 18 provinsi yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. *Kedua*, klasifikasi daerah berikutnya adalah daerah relatif tertinggal, yaitu sebanyak 10 provinsi yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua. *Ketiga*, klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh sebanyak 3 provinsi, yaitu Kepulauan Riau,

DKI Jakarta, dan Papua Barat. *Keempat*, klasifikasi daerah maju tapi tertekan sebanyak 2 provinsi, yaitu Riau dan Kalimantan Timur.

2. Saran

Berdasarkan hasil-hasil analisis dapat ditarik implikasi kebijakan sebagai berikut. *Pertama*, kebijakan pembangunan daerah hendaknya lebih memprioritaskan provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal. Untuk meningkatkan perekonomian provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal, diperlukan kebijakan yang memberikan insentif bagi investasi di daerah tersebut. Insentif dapat berupa perbaikan sarana dan prasarana maupun lingkungan yang kondusif untuk investasi di daerah tersebut.

Kedua, provinsi lainnya tetap perlu mendapatkan perhatian dengan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya, terutama yang

termasuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan, dan daerah berkembang cepat. Diharapkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah, daerah-daerah tersebut dapat meningkatkan klasifikasinya menjadi klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh.

Ketiga, provinsi yang termasuk dalam klasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sehingga mampu mempertahankan posisinya pada klasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Piter, dkk., 2002. *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Aswandi, Hairul dan Mudrajad Kuncoro, 2002. "Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 17, Nomor 1.
- Bank Indonesia, 2006. Analisis Klassen *Typology* Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2007. *Pendapatan Regional Bengkalis, 2001-2006*.
- Bahl, Roy and Sally Wallace, 2001. "Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension". *Public Finance in Developing and Transition Countries: A Conference in Honor of Richard Bird Conference Papers*. April 3. Georgia State University, Atlanta, Georgia.
- Carrol, Michael C. and James R. Stanfield, 2001. "Sustainable Regional Economic Development". *Journal of Economic Issues*. Volume XXXV, Nomor 2.
- Radianto, Elia, 2003. "Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusuhan di Maluku", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Volume 51, Nomor 4.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2001. *Ekonomika Publik*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Sidik, Machfud, 2002. "Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah". Seminar Nasional: *Menciptakan Good Governance demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. 20 April. Yogyakarta.
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era*

Otonomi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tarigan, Robinson, 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Wardana, I Made. 2007. "Analisis Strategi Pembangunan Provinsi Bali Menuju *BalanceGrowth*", *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 12, Nomor 2.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id, diakses pada 07/08/2015 dan 20/08/2015.